



RENJA PERUBAHAN BADAN KESBANGPOL KAB. KUTAI KARTANEGARA



Badan Kesbangpol
Kab. Kutai Kartanegara
Jl. Awang Sabran, Bc.Hk No. G3
Tenggarong Telp. 0541-661518
Fax 0541-661518 Kode Pos 75514



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Drs. Awang Sabran, Bc. Hk. No. 3 G. Telp. (0541) 661518 Fax. 662602

T E N G G A R O N G

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B- /KESBANGPOL/SET.I/000/07/2020

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang

- : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- b. bahwa adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2020 serta adanya kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang harus diselesaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dilakukan perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, selanjutnya disebut Perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

KETIGA

: Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesbangpol ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : Juli 2020

Kepala Badan,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
Nip. 19691226 200112 2 002



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 menjabarkan capaian target kinerja pada semester pertama yang telah dicapai serta target kinerja yang harus diperbaiki dan dicapai hingga akhir tahun perencanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan alat pengukur keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis yang diakhiri dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selain itu, Perubahan Rencana Kerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara evaluasi rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam semester kedua dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana kerja kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator-indikator capaian kinerja yang dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran berupa *input*, *output*, dan *outcome* dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.



DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Renstra PD pada tahun 2020.....	41
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Program dan Kegiatan	47
BAB IV PENUTUP	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antara kota dan desa, antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah yang sangat prioritas dalam pembangunan dewasa ini.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari semua unsur tersebut, memanasnya suhu politik menjelang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 ini, maka penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik perlu mengambil langkah-langkah guna membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan strategi dan kebijakan.

Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kerja berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas pada semester kedua tahun 2020 ini, yang dimulai tahapannya pada tahun 2019 lalu berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan tahun Ketiga RPJMD 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja PD merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses perencanaan kerja tahunan tentunya tidak terlepas dari rencana strategis



yang telah dibuat sebagai acuan kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan dan pada tahun 2020 sebagaimana renstra yang ada akan lebih fokus kepada pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara serta peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai langkah awal, diperlukan upaya penyempurnaan matriks struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan diimplementasikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan Perubahan RAPBD tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renja PD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Daerah;



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas;
8. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bersama Mendagri dan Menag No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program dan kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;
2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang diinginkan.



1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja PD

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja .

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2020.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Renstra PD 2020

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD.



BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD/Renstra PD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Evaluasi kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 sampai dengan semester pertama. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini, sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai tujuan, visi dan misi daerah, namun dalam laporan ini akan disajikan secara garis besar

Uraian Capaian Kinerja Tahun 2020 (Semester Pertama)

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 (Semester Pertama)

Dari data awal tahun 2019 telah dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan hasil Perubahan Renstra Badan Kesbangpol 2016 – 2021 sebagai berikut :



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2020 (SMT I)	% PENCA PAIAN	KETERANGAN
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Konflik dan Gejolak	33	12	34,29%	Data dasar Jumlah Konflik dan kejadian konflik pada tahun 2020 yang dapat diatasi
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	80%	36,58%	45,73%	kegiatan pada semester I belum dilaksanakan sepenuhnya karena terkendala pandemi
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	71 %	0%	0%	Pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020
TOTAL KINERJA PADA SEMESTER I			48,22%		

Selain dari indikator kinerja utama diatas juga dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada semester pertama sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020 (SMT I)	% PENCA PAIAN	KETERANGAN
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Kesbangpol)	Cakupan Penanganan Konflik	100 %	40%	40%	Data dasar Jumlah Konflik dan kejadian konflik pada tahun 2020 dapat diatasi
	Cakupan Penanganan Gejolak Masyarakat	100 %	27,78%	27,78%	Gejolak masyarakat pada tahun 2020 mendapatkan penanganan dari Pemerintah
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan	80%	10%	12,50%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur belum dilaksanakan sepenuhnya karena pandemi
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat	80%	0%	0%	Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena pandemi dan akan dilaksanakan pada semester II.



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik	80 %	17,56%	21,95%	Pelaksanaan kegiatan terkendala pandemi, kegiatan dilakukan dengan pembatasan peserta
	Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	90%	50%	55,56%	Dari target 20 ormas telah terpenuhinya 10 ormas yang telah tertib administrasi dalam perpanjangan dan pendaftaran serta pelaporan SKT
	Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%	Semua partai politik melengkapi berkas adm. Bantuan keuangan
TOTAL KINERJA PROGRAM PADA SEMESTER I			24,76%		

Pencapaian Program dan Kegiatan

Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol belum berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol tahun 2020, dengan perhitungan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja terdapat 1 (satu) indikator kinerja realisasinya memenuhi target sasaran, namun terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang realisasinya belum mencapai target.

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2020 semester I dengan rincian realisasi kinerja sebesar 24,76 % dan realisasi keuangan sebesar 16,46 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini

Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dikarenakan capaian tersebut belum dilaksanakan pada semester I tahun 2020, secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Dari review renja 2020, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :



1. Terdapat target kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Seluruh jadwal pelaksanaan kegiatan pada semester I harus diundur hingga semester II karena dampak pandemi, hanya beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan pada semester I
 - b. Adanya perubahan tahapan pemilu dan harus memulai dari awal lagi.
2. Terdapat target kinerja yang memenuhi target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Pengaturan jadwal kegiatan terlaksana dengan baik walaupun terkendala pandemi dan dilakukan jadwal ulang, namun pelaksanaan tetap dilakukan melalui media digital
 - b. Kegiatan dilaksanakan dengan maksimal, dan terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik dari stakeholders terkait
 - c. Proses pelaporan kegiatan di lapangan berjalan efektif dan efisien
3. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka langkah yang telah diambil oleh OPD adalah :
 - a. Membuat rencana prioritas terhadap program dan kegiatan yang dianggap sebagai pendukung utama capaian target kinerja
 - b. Membagi porsi anggaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang mendesak terhadap kegiatan di perangkat daerah
 - c. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan anggaran disesuaikan dengan kegiatan prioritas perangkat daerah
 - d. Mengusulkan kegiatan pendukung capaian program pada APBD Perubahan tahun 2020



- e. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja yang belum tercapai pada APBD Perubahan tahun 2020

Terhadap capaian program renstra, tentu saja hal ini sangat mempengaruhi karena banyak kegiatan pendukung capaian program belum dilaksanakan, dan hal ini akan segera ditindaklanjuti pada semester II yang akan datang dan adanya usulan pada APBD Perubahan Tahun 2020.

Dalam menuju capaian tersebut, tentunya terdapat permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam renstra kami yang dijabarkan ke dalam Renja, berikut kami sampaikan penjelasan secara rinci terkait capaian dan rencana ke depan dalam beberapa masalah yang ada :

1. Munculnya konflik dan gejolak di masyarakat

Data Gangguan dan Konflik

Berada dimasa pandemi Covid-19 dari bulan Maret hingga saat ini keadaan perkembangan ekonomi melambat sehingga mengakibatkan beberapa perusahaan harus mengadakan rasionalisasi jumlah karyawan sebagai langkah efisiensi operasional perusahaan. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sedikit banyak menjadi beban sosial bagi daerah yang bisa berakibat meningkatnya angka kriminalitas ataupun penyakit masyarakat lainnya.

Berdasarkan inventarisasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi sumber potensi konflik di masyarakat di tahun 2020, yaitu :



1. Permasalahan Pertanahan :
 - a. Tumpang tindih kepemilikan lahan antar masyarakat.
 - b. Tumpang tindih kepemilikan lahan antar masyarakat dengan perusahaan.
 - c. Klaim penguasaan tanah oleh kelompok masyarakat terhadap lahan garapan.
 - d. Klaim penguasaan tanah/lahan melalui lembaga adat Grant Sultan atau lahan keluarga kesultanan.
 - e. Klaim penguasaan tanah/lahan eks tambang batubara yang mengatasnamakan warga sekitar maupun ormas atau lembaga adat.
2. Gesekan sosial yang bernuansa SARA.
 - a. Gesekan sosial dengan membawa nama kesukuan dan agama sangat rentan menjadi pemicu konflik sosial, dengan atasnama kesukuan dan agama, masyarakat sangat mudah dimobilisasi tanpa harus menggunakan biaya yang banyak bahkan tanpa biaya operasional, adanya ketersinggungan yang bernuansa SARA sangat cepat memantik api pemicu konflik.

Pada tahun 2019 di Kutai Kartanegara telah terjadi antar suku Kutai (Datasemen Remaong) dengan warga suku Jawa di Kelurahan Maluhu, yang pada awalnya karena ketersinggungan ucapan salah seorang warga Maluhu yang berakibat konflik kesukuan.
 - b. Konflik keagamaan terjadi di Kutai Kartanegara, yakni :
 - 1) Penolakan warga RT XV Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong atas pembangunan Gereja jemaat GKII di Jl. Tennis



Lapangan hingga saat ini belum terselesaikan, ini akan menjadi bom waktu konflik agama, dimana kalau di telaah dari segi aturan, pembangunan gereja ini sangat tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam perizinan pembangunan rumah ibadat. Bola panas ini tinggal menunggu pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah yang tegas agar tidak menjadi konflik dikemudian hari.

- 2) penolakan warga kelurahan Jahab tentang keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang berencana membangun Pesantren dimana mayoritas warga yang bermukim diwilayah tersebut adalah warga yang beragama non muslim (Kristen). Terlebih dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan anggota jamaah khilafatul muslimin terhadap anak warga setempat sehingga menimbulkan antipasti terhadap keberadaan organisasi tersebut.
3. Permasalahan batas wilayah administrasi antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten.
4. Tuntunan masyarakat lokal memperoleh pekerjaan pada perusahaan yang beroperasi di daerah setempat. Terlebih saat ini dengan melemahnya ekonomi membuat beberapa perusahaan yang menutup kegiatan operasional sehingga banyak terjadinya PHK.
5. Tuntunan masyarakat terhadap realisasi lahan plasma perkebunan kelapa sawit yang tidak direalisasikan oleh perusahaan.
6. Kutai Kartanegara saat ini harus lebih waspada dengan kemungkinan hidup kembalinya sel-sel terorisme karena sudah beberapa narapidana



teroris yang bebas dari hukuman. Tidak menutup kemungkinan ideologi tersebut kembali hidup dan berkembang dan mencari lapangan/tempat berjihad.

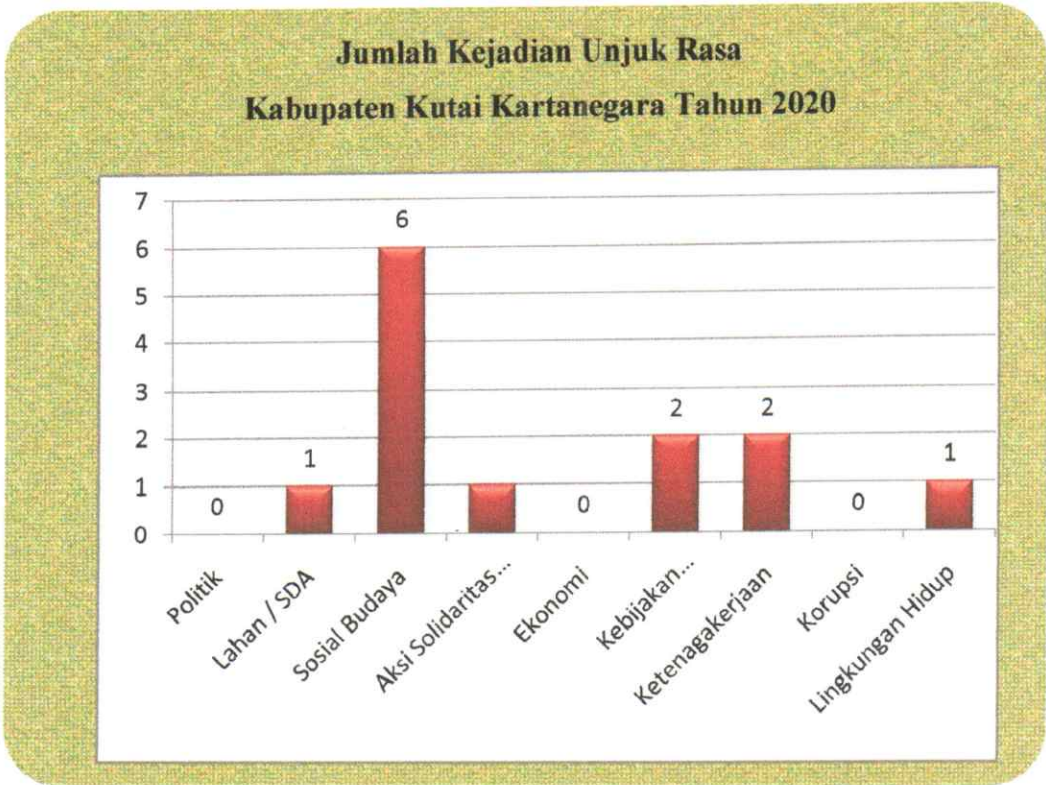
7. Merebaknya virus corona (covid-19) di Wuhan China di bulan Desember 2019, perlu diwaspadai masuk ke Kutai Kartanegara, mengingat di Indonesia telah banyak proyek investasi dari China yang langsung dikerjakan oleh pekerja dari China. Di Kutai Kartanegara setidaknya ada 2 (dua) proyek Investasi China yakni pembangunan Pembangkit Listrik di Muara Jawa dan Pembangkit Listrik di Tanjung Batu Embalut. Dan tidak menutup kemungkinan virus tersebut dibawa oleh pekerja tersebut atau oleh warga Indonesia ataupun warga Negara asing yang melawat ke Indonesia dengan dibuka visa kunjungan.
8. Selain dari kemungkinan pekerja asal cina bisa mebawa virus corona (covid-19), juga tidakadanya pembatasan keluar masuknya pendatang ke Kalimantan Timurdari luar daerah, sehingga bisa jadi pintu masuk impor virus corona yang kemudian terjadi transmisi lokal di Kutai Kartanegara.

Secara umum kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2020 dalam kondisi yang kondusif. Berdasarkan catatan bahan pengkajian permasalahan aktual daerah dari bulan Januari hingga bulan Juli terdapat jumlah aksi unjuk rasa dibanding sama dengan tahun 2019 pada periode yang sama.

Pada tahun 2019 (Januari-Juli 2019) terdapat aksi unjukrasa sebanyak 13 kali aksi, sedangkan pada tahun 2020 aksi unjukrasa sebanyak 13 kali aksi (Januari-Juli 2020). Dengan permasalahan yang dominan adalah berlatar Sosial dan Budaya, kemudian masalah lahan masyarakat dengan perusahaan dan



masalah kebijakan pemerintah dalam kaitan perlunya perhatian pada peningkatan fasilitas umum bagi masyarakat seperti perbaikan jalanan umum. Berikut disajikan data-data rekapitulasi kejadian selama tahun 2020 periode Januari-Juli 2020.





RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan latar belakang masalah) di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020

No	Latar Belakang Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Politik													0
2	Lahan / SDA							1						1
3	Sosial Budaya		3	2	1									6
4	Aksi Solidaritas peristiwa Kemanusiaan nasional/ internasional							1						1
5	Ekonomi													0
6	Kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1		1										2
7	Ketenagakerjaan					1		1	1					2
8	Korupsi													0
9	Lingkungan Hidup	1												1
Jumlah Unjuk Rasa		2	3	3	1	1	0	3	0	0	0	0	0	13

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan kelompok aksi) di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020

No	Pelaku Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Mahasiswa (Organisasi & Kelompok Mahasiswa)		1					1						2
2	Gabungan Organisasi (Mahasiswa, Ormas, OKP, parpol dan Masyarakat)		1											2
3	Ormas / LSM		1											1
4	Elemen Masyarakat	2	1	2	1			1						7
5	Karyawan / Serikat Pekerja					1								1
6	Organisasi Profesi													0
Jumlah Pelaku Unjuk Rasa		2	4	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	13



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

Berikut data kejadian sengketa hubungan industrial dan penanganan sengketa yang terjadi sepanjang tahun 2020.

Rekapitulasi Data Sengketa Hubungan Industrial di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2020

No	Jenis Sengketa	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sengketa Pengusaha dengan Perusahaan / Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sengketa Pekerja dan Pengusaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyelesaian Sengketa Buruh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mediasi Sengketa Perusahaan dan Masyarakat	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah Sengketa Hubungan Industrial		-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2

Sebelum merebaknya kasus Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa konflik masyarakat dengan perusahaan seperti penolakan penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batubara maupun CPO, selain itu adanya konflik antar masyarakat dengan kebijakan pemerintah terkait fasilitas umum yang rusak atau terjadinya pencemaran lingkungan.

Data diatas menunjukkan konflik pada periode bulan Januari-Juli 2020 didominasi konflik Sosial Budaya seperti pada bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kebijakan pembangunan maupun konflik ormas dengan perusahaan maupun konflik ormas dengan ormas lainnya.

Badan Kesbangpol telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya agar tidak meluas dan menimbulkan konflik yang



berkepanjangan agar situasi dan kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Memfasilitasi pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial yang anggota terdiri dari Lintas SKPD baik vertikal dan horizontal sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 42 Tahun 2014 tentang tim terpadu penanganan konflik sosial
2. Memanfaatkan organisasi yang telah dibentuk di Kecamatan dan Desa/Kelurahan seperti FKDM, FKUB dan FPK sebagai wadah deteksi dini konflik yang akan berkembang.
3. Membentuk Tim Kewaspadaan Dinidi tiap Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Kabupaten untuk melaksanakan pemantauan deteksi dini
4. Memfasilitasi pihak yang berkonflik dalam suatu musyawarah untuk menemukan solusi terbaik agar tidak terjadi bentrokan
5. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan.

Dari data diatas, masih terdapat kasus tentang sara, dan hal ini harus diwaspadai, kemudian juga akan kami sampaikan tentang jumlah kasus penyakit masyarakat sebagai berikut :

Tugas lain dari Badan Kesbangpol mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan sosialisasi pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat (Pekat) seperti, Pencurian, Perjudian, Peredaran Uang palsu, Narkoba, Asusila dan lain-lain.



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

Berikut disampaikan data pantauan kasus penyakit masyarakat di Kutai Kartanegara pada tahun 2020 (semester I) berdasarkan data dari Badan Kesbangpol Kukar.

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2020 (semester I)

No.	Penyakit Masyarakat	Jumlah Kasus
1	Narkoba	15
2	Minuman Keras	6
3	Premanisme	0
4	Pornografi	0
5	Pembunuhan	2
6	Pencurian	23
7	Penganiayaan	5
8	Kejahatan Seksual	3
9	Eksplorasi Anak Bawah Umur	6
JUMLAH		60

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada semester I tahun 2020 masih cukup tinggi terutama pada kasus narkoba, untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut guna menekan naiknya angka kasus narkoba tersebut, diantaranya dengan melakukan pemetaan wilayah di 18 Kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pencegahan dengan kerjasama antara kepolisian dan BNK untuk melakukan tindakan dilapangan, capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan sehingga diperlukan penyesuaian dan penambahan pagu anggaran untuk mencapai target,hal ini juga disebabkan oleh adanya operasi dari pihak kepolisian dengan sandi "Operasi Bersinar" sejak tahun 2017 hingga 2019



seluruh kejahatan narkoba dapat dibongkar, dengan harapan pada tahun berikutnya jumlah kasus ini akan berkurang. Untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.

Dari permasalahan yang ada diatas, Badan Kesbangpol telah menjalankan 2 program yaitu, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

2. Menurunnya Partisipasi Politik Masyarakat

Politik Dalam Negeri

Dibidang Politik dalam negeri, Badan kesbangpol mempunyai peran memfasilitasi program pendidikan politik masyarakat, yaitu dengan menumbuhkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat, seperti memfasilitasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan memfasilitasi Partai Politik dalam bantuan keuangan partai politik.

Berikut ini disajikan data keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dan data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak Pilih di Kutai Kartanegara selama periode 2013 - 2019. *Lihat tabel berikut :*



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar tahun 2020 (semester I)

No	Kecamatan	Ormas	OKP	LSM	Paguyuban	Keagamaan	Profesi	Lemb. Adat	Jumlah
1	Marangkayu	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Muara badak	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Samboja	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Muara Jawa	-	-	-	1	-	-	-	1
5	Sanga-sanga	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Anggana	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Loa Janan	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Loa Kulu	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Tenggarong Seberang	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Tenggarong	8	-	-	1	-	-	-	9
11	Sebulu	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Muara Kaman	-	-	-	-	-	-	-	0
13	Kota bangun	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Muara Wis	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Muara Muntai	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Kenohan	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Kembang janggut	-	-	-	-	-	-	-	0
18	Tabang	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah		8	0	0	2	0	0	0	10

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2013-2019

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2018	2019
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilgub: 53,97%	1. Pileg: 68,46% 2. Pilpres: 63,36 %	Pilbup : 58,93%	Pilkades: 06%	Pilgub : 60,44%	Pileg Pilpres Serentak : 81,24%

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2013 – 2019 yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak tahun 2019 sebesar 81,24 % angka ini sudah melebihi dari target nasional sebesar 77,05% hingga target yang telah ditetapkan berhasil dicapai bahkan melebihi, hal ini disebabkan oleh banyaknya



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

kepentingan politik pada proses pemilihan ini dan kegiatan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh berbagai pihak antara Pemerintah dan Swasta, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 70 %, hal ini akan dipertahankan dan akan ditingkatkan lagi dalam menghadapi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2020 yang akan datang dimana angka partisipasi pada tahun 2015 lalu hanya 58,93%, maka Badan Kesbangpol akan menganalisis lagi kantong-kantong daerah yang masih tinggi angka golputnya. Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah penguatan sosialisasi terhadap berbagai kalangan dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2020 ini.

Untuk fasilitasi partai politik telah dilaksanakan pada awal triwulan II sehingga untuk data parpol penerima bantuan keuangan dapat disajikan, untuk tahun ini bantuan keuangan akan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu untuk partai politik hasil Pemilu Pemilu 2019 sebagai berikut :

**DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5 Kursi	34.286 Suara	130.286.800	LENGKAP
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7 Kursi	46.667 Suara	177.334.600	LENGKAP
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7 Kursi	45.361 Suara	172.371.800	LENGKAP
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	13 Kursi	95.345 Suara	362.311.000	LENGKAP
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2 Kursi	20.373 Suara	77.417.400	LENGKAP
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3 Kursi	23.250 Suara	88.350.000	LENGKAP



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

7.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1 Kursi	14.340 Suara	54.492.000	LENGKAP
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1 Kursi	16.764 Suara	63.703.200	LENGKAP
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5 Kursi	34.071 Suara	129.469.800	LENGKAP
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1 Kursi	12.410 Suara	47.158.000	LENGKAP
JUMLAH		45 Kursi	342.867 Suara	1.302.894.600	

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 Total Anggaran belanja Badan Kesbangpol Rp. 15.130.873.672,21 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dengan realisasi atau serapan pada semester I adalah Rp. 4.501.975.288,00 (29,75%). Sedangkan untuk belanja langsung pada semester I sebesar 16,46%, serapan yang kecil ini disebabkan adanya penundaan kegiatan di lapangan terkait kejadian pandemi covid-19. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan rincian per kegiatan sebagai berikut :

Data Pengelolaan Keuangan OPD Tahun 2020 (semester I)

No	Fokus	Jenis Data	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
1.	Alokasi Anggaran SKPD	Total Anggaran SKPD	15.130.873.672,21	4.501.975.288,00	10.628.898.384,21	29,75
2.	Kesbangpol	Alokasi Belanja Langsung	6.724.075.943,40	1.106.845.184,00	5.617.230.759,40	16,46
3.		Alokasi Belanja Tak Langsung	8.406.797.728,81	3.395.130.104,00	5.011.667.624,81	40,39
4.		Besaran Belanja Barang dan Jasa	5.840.901.743,40	999.945.184,00	4.840.956.559,40	17,12
5.		Besaran Belanja Pegawai	745.138.000,00	98.305.000,00	646.833.000,00	13,19
6.		Besaran Belanja Modal	138.036.200,00	8.595.000,00	129.441.200,00	6,23
7.		Total Belanja SKPD	15.130.873.672,21	4.501.975.288,00	10.628.898.384,21	29,75
8.		Belanja Pemeliharaan	95.000.000,00	41.775.000,00	53.225.000,00	17,45



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

Data Pengelolaan Keuangan OPD Tahun 2019 (semester I)

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.287.602.903,40	357.274.684,00	930.328.219,40	27,75
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	50.961.124,00	79.038.876,00	39,20
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	5.760.000,00	19.240.000,00	23,04
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.050.000,18	9.256.800,00	3.793.200,18	70,93
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.614.651,06	25.443.000,00	171.651,06	99,33
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	12.520.700,00	2.479.300,00	83,47
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,27	5.000.000,00	0,27	100,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,04	5.000.000,00	0,04	100,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000,32	5.432.000,00	4.568.000,32	54,32
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	427.140.149,00	119.447.300,00	307.692.849,00	27,96
10	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	374.848.102,49	105.133.760,00	269.714.342,49	28,05
11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,04	3.525.000,00	1.475.000,04	70,50
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000,00	1.200.000,00	750.000,00	61,54
13	Penataan Arsip Perangkat Daerah	250.000.000,00	8.595.000,00	241.405.000,00	3,44
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.000.000,00	41.775.000,00	88.225.000,00	32,13
14	Pengadaan Peralatan Gedung	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000,00	7.419.000,00	12.581.000,00	37,10
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65.000.000,00	28.356.000,00	36.644.000,00	43,62
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	60,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	4.850.000,00	95.150.000,00	4,85
18	Fasilitasi Tim Bekas Perangkat Daerah	100.000.000,00	4.850.000,00	95.150.000,00	4,85
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	367.480.000,00	91.785.500,00	275.694.500,00	24,98
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	150.000.000,00	32.105.500,00	117.894.500,00	21,40
20	Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Akhir	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
21	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	129.600.000,00	43.200.000,00	86.400.000,00	33,33
22	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	42.880.000,00	16.480.000,00	26.400.000,00	38,43
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	325.000.000,00	59.364.900,00	265.635.100,00	18,27
23	Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah	250.000.000,00	44.269.900,00	205.730.100,00	17,71
24	Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar	75.000.000,00	15.095.000,00	59.905.000,00	20,13
	Program Pengembangan Wawasan	2.459.993.040,00	197.647.500,00	2.262.345.540,00	8,03



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

	Kebangsaan				
25	Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan	1.159.993.040,00	192.347.500,00	967.645.540,00	16,58
26	Pembinaan Ideologi Karakter dan Wasbang (Peningkatan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan)	1.075.000.000,00	-	1.075.000.000,00	-
27	Pembinaan Ideologi Karakter dan Wasbang (Kegiatan Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan)	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
28	Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional	25.000.000,00	5.300.000,00	19.700.000,00	21,20
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
29	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Budaya	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.854.000.000,00	354.147.600,00	1.499.852.400,00	19,10
30	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum	1.724.000.000,00	304.061.000,00	1.419.939.000,00	17,64
31	Fasilitasi Partai Politik	50.000.000,00	39.886.000,00	10.114.000,00	79,77
32	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	30.000.000,00	10.200.600,00	19.799.400,00	34,00
33	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
	JUMLAH	6.724.075.943,40	1.106.845.184,00	5.617.230.759,40	16,46

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2020 DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2020
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d. 2021		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2019		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020						CATATAN PENTING	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2020			
				K	Satuan	K	Satuan	7	K	Satuan	REALISASI RENJA PD TRIWULAN II		TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA		
											K	Satuan	K				Satuan	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 87x100		10	11 = 6+8		12 = 11/5x100	
1.05																		
		URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
	1.05 .1.05.03 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	98,36	persen	100	persen	33,67	persen	33,67	persen		57,81	persen	57,81	persen
1	1.05 . 1.05.03 .01 . 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	726	rekening	432	rekening	146	rekening	72	rekening	49,32	persen		504	rekening	69,42	persen
2	1.05 . 1.05.03 .01 . 02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	item	-	item	25	item	10	item	40,00	persen		10	item	20,00	persen
3	1.05 . 1.05.03 .01 . 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	202	unit	104	unit	42	unit	29	unit	69,05	persen		133	unit	65,84	persen
4	1.05 . 1.05.03 .01 . 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	135	item	81	item	27	item	27	item	100,00	persen		108	item	80,00	persen
5	1.05 . 1.05.03 .01 . 07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	28	cetakan	18	cetakan	5	cetakan	5	cetakan	100,00	persen		23	cetakan	82,14	persen
6	1.05 . 1.05.03 .01 . 08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	226	buah	-	buah	113	buah	113	buah	100,00	persen		113	buah	50,00	persen
7	1.05 . 1.05.03 .01 . 10	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor	42	jenis barang	-	jenis barang	21	jenis barang	21	jenis barang	100,00	persen		21	jenis barang	50,00	persen
8	1.05 . 1.05.03 .01 . 11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	658	paket	404	paket	127	paket	70	paket	55,12	persen		474	paket	72,04	persen
9	1.05 . 1.05.03 .01 . 12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah kegiatan rapat- rapat	879	o/h	429	o/h	230	o/h	63	o/h	27,39	persen		492	o/h	55,97	persen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d. 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s.d TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2020	REALISASI RENJA PD TRIWULAN II	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
10	1.05.1.05.03.01.13	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis	Jumlah Tenaga Harian Lepas	5 1.323 orang/bulan	6 777 orang/bln	7 240 orang/bln	8 98 orang/bln	9 = 87x100 40,83 persen	10	11 = 6+8 875 orang/bln	12 = 11/5x100 66,14 persen
11	1.05.1.05.03.01.14	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan yang diperbaiki	81 unit	45 unit	18 unit	10 unit	55,56 persen		55 unit	67,90 persen
12	1.05.1.05.03.01.15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1.806 lembar	906 lembar	400 lembar	250 lembar	62,50 persen		1.156 lembar	64,01 persen
13	1.05.1.05.03.01.16	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip	37 unit	- unit	37 unit	3 unit	8,11 persen		3 unit	8,11 persen
1.05.1.05.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	88 persen	82 persen	85 persen	28,48 persen	33,51 persen		36,72 persen	41,72 persen
14	1.05.1.05.03.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	20 unit	- unit	2 unit	- unit	- persen		- unit	- persen
15	1.05.1.05.03.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	6 unit gedung	2 unit gedung	2 unit gedung	1 unit gedung	50,00 persen		3 unit gedung	50,00 persen
16	1.05.1.05.03.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	172 unit	104 unit	34 unit	11 unit	32,35 persen		115 unit	66,86 persen
17	1.05.1.05.03.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	50 unit	- unit	25 unit	15 unit	60,00 persen		15 unit	30,00 persen
1.05.1.05.03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	87,39 persen	87,14 persen	87,39 persen	- persen	- persen		33,33 persen	38,14 persen
18	1.05.1.05.03.05.03	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	3 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	- inovasi	- persen		1 inovasi	33,33 persen
1.05.1.05.03.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	100 persen	- persen	100 persen	- persen	- persen		- persen	- persen
19	1.05.1.05.03.06.22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan	10 dokumen	- dokumen	5 dokumen	- dokumen	- persen		- dokumen	- persen
20	1.05.1.05.03.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	3 dokumen	- dokumen	3 dokumen	- dokumen	- persen		- dokumen	- persen
21	1.05.1.05.03.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 dokumen	- dokumen	2 dokumen	- dokumen	- persen		- dokumen	- persen
			Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	100 persen	100 persen	100 persen	66,67 persen	66,67 persen		73,33 persen	73,33 persen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d. 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2020		
				5	6	7	8	9 = 8/7x100		10	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
											TARGET RENJA PD TAHUN 2020	REALISASI RENJA PD TRIWULAN II
22	1.05.03.06.17	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Money	1. Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPI, LKJIP dan Money	30 dokumen	18 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	66,67 persen	22 dokumen	11 = 6x8	12 = 11/5x100	
	1.05.03.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah	1. Cakupan penanganan konflik	100 persen	100 persen	100 persen	40,00 persen	40,00 persen	50,86 persen	50,86 persen	50,86 persen	
23	1.05.03.16.01		Jumlah Laporan Penanganan Konflik	814 laporan	314 laporan	250 laporan	100 laporan	40,00 persen	414 laporan	50,86 persen	50,86 persen	
			2. Cakupan penanganan gejala masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	27,78 persen	27,78 persen	60,32 persen	60,32 persen	60,32 persen	
24	1.05.03.16.05	Pemantauan Dampak Kenalkan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar	Jumlah laporan pemantauan	63 laporan	33 laporan	18 laporan	5 laporan	27,78 persen	38 laporan	60,32 persen	60,32 persen	
	1.05.03.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang	100 persen	58,32 persen	80 persen	3,48 persen	4,35 persen	30,21 persen	30,21 persen	30,21 persen	
25	1.05.03.17.01	Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	5.344 orang	750 orang	2522 orang	150 orang	5,95 persen	900 orang	16,84 persen	16,84 persen	
26	1.05.03.17.02	Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang (Bela	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	450 orang	243 orang	260 orang	0 orang	- persen	243 orang	54,00 persen	54,00 persen	
27	1.05.03.17.02	Pembinaan ideologi, Karakter dan Wasbang	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan			300 orang	0 orang	- persen	- orang	- persen	- persen	
28	1.05.03.17.08	Peringatan Hari Hari Besar / Nasional	Jumlah upacara	6 upacara	2 upacara	3 upacara	1 upacara	33,33 persen	3 upacara	50,00 persen	50,00 persen	
	1.05.03.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat	100 persen	60 persen	80 persen	- persen	- persen	77,78 persen	77,78 persen	77,78 persen	
29	1.05.03.20.01	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	450 orang	350 orang	1600 orang	- orang	- persen	350 orang	77,78 persen	77,78 persen	
	1.05.03.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat										
			1. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik	100 persen	59,32 persen	80 persen	17,56 persen	21,95 persen	90,71 persen	90,71 persen	90,71 persen	
30	1.05.03.21.03	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum	Jumlah peserta	9.500 orang	7.739 orang	5000 orang	878 orang	17,56 persen	8.617 orang	90,71 persen	90,71 persen	

NO	KODE	URUSAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d. 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2020	
						TARGET RENJA PD TAHUN 2020	REALISASI RENJA PD TRIWULAN II	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7x100	10	11 = 6+8	12 = 11/5x100
31	1.05.1.05.03.21.10	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	2. Persentase ormas yang tertib administrasi	100 persen	40,00 persen	90 persen	50,00 persen	55,56 persen		13,75 persen	13,75 persen
32	1.05.1.05.03.21.11	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang difasilitasi	80 ormas	12 ormas	20 ormas	10 ormas	50,00 persen		22 ormas	27,50 persen
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah	Jumlah Peserta	210 orang	- orang	50 orang	- orang	- persen		- orang	- persen
33	1.05.1.05.03.21.06	Fasilitasi Partai Politik	3. Persentase parpol yang tertib administrasi	100 persen	100,00 persen	100 persen	100,00 persen	100,00 persen		66,67 persen	66,67 persen
			Jumlah Parpol yang difasilitasi	48 parpol	16 parpol	16 parpol	16 parpol	100,00 persen		32 parpol	66,67 persen

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Periode pembangunan tahun 2016 s/d 2021, penyelenggaraan pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, data yang dapat disajikan adalah data LPPD Kutai Kartanegara 2019. Badan Kesbangpol telah melakukan upaya-upaya konkrit berupa pembinaan politik di daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain. Pembinaan terbanyak dilakukan adalah pada tahun 2015, pembinaan politik di daerah paling besar pada tahun 2015 yaitu sebesar 58 kegiatan, hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tahun 2015, kegiatan ini telah membawa hasil yakni penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai serta legitimate. Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 capaian menurun disebabkan oleh keterbatasan anggaran, dan untuk tahun 2018 dan 2019 akan diharapkan akan sesuai dengan target pada renstra dengan didukung pendanaan yang memadai. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan OPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berkenaan. Selengkapnya dapat disampaikan pada tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	-	III.3	48 kegiatan	65 kegiatan	68 kegiatan	48 kegiatan	55 kegiatan	70 kegiatan	76 kegiatan	6 kegiatan	48 kegiatan	55 kegiatan			
2	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	III.3	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	32 kegiatan	36 kegiatan	9 kegiatan	8 kegiatan	3 kegiatan	32 kegiatan	36 kegiatan			

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19891226 200112 2 002



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	Tugas Pokok dan Fungsi, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	1. Merupakan Tupoksi	1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsi serta keberadaan Badan Kesbangpol Kab. Kukar	1. Distribusi penempatan pegawai yang belum merata pada setiap bidang / bagian
	2. Masih kurangnya keamanan dan kenyamanan masyarakat		2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan	2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku	2. Belum adanya analisis kebutuhan beban kerja
	3. Masih rendahnya		3. Adanya rasa tanggung jawab	3. Kebijakan Pemerintah	3. Belum tersedianya



	pemahaman wasbang masyarakat		yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas dan rasa memiliki organisasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	perangkat lunak (software) yang memadai secara khusus
	4. Masih tingginya jumlah kasus penyakit masyarakat				4. Belum adanya SOP mengenai tupoksi masing- masing pekerjaan
	5. Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat				5. Perlunya sosialisasi keberadaan Kesbangpol kepada masyarakat

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.



1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme. Disamping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan ketertiban, tidak



terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang di lindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralism lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam membentuk perannya sebagai "penengah" yang adil dalam



mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga Negara (citizen) bukan sebagai pelanggan (customer). Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai "Promotor Pembangunan" berubah menjadi "Pelayan Masyarakat". Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat,



melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

7) Program Pro-Masyarakat

Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.



Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak kewajiban masyarakat sebagai warga Negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka tunggal Ika”



sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.

2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat



lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan :

a. Partai Politik

Partai Politik berperan dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat;

b. Tokoh politik dan tokoh masyarakat

Para tokoh politik dan tokoh masyarakat diharapkan bisa memberikan teladan kepada masyarakat mengenai tata cara berpolitik yang baik, santun, penuh dedikasi dan loyalitas sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan



menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

Dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Bupati dan Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- A. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum
- B. Derasnya Aspirasi atau keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk kabupaten-kabupaten baru (Kabupaten Kutai Pesisir dan Kabupaten Kutai Tengah) dalam bingkai pemekaran wilayah, hal ini akan memicu terjadinya konflik horisontal yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
- C. Seringnya terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang dan perkebunan, kepemilikan lahan tumpang tindih yang sulit diselesaikan karena belum semua kecamatan mempunyai tapal batas yang valid, kemudian tidak terserapnya tenaga kerja lokal yang bisa menimbulkan konflik sehingga mengganggu iklim investasi
- D. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga banyak terdapat pulau-pulau kecil di pesisir pantai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh teroris sebagai tempat persembunyian.



- E. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan ekses dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- F. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA.
- G. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
- H. Semakin meningkatnya permasalahan penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, peredaran uang palsu, pornografi, peredaran dan penyalahgunaan Obat-obatan terlarang (Narkoba).
- I. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam cara penyampaian aspirasi, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan politik masyarakat, sehingga dapat memanfaatkan saluran aspirasi.
- J. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan tolok ukur tingkat partisipasi pemilih dan menurunnya Golput.
- K. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sebagai wadah kegiatan sehingga terjalin pola kemitraan dengan pemerintah dalam percepatan pembangunan.
- L. Penciptaan iklim demokratis pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019 serta menjelang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 (9 Desember 2020).

MATRIK PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	URUSAN/PROGRAM	MASALAH YANG DIHADAPI	AKAR MASALAH	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
I	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pelaksanaan kegiatan FKDM Kabupaten dan Pembentukan FKDM tingkat kecamatan	Belum terbntuknya FKDM tingkat kecamatan di 18 Kecamatan	perlu segera dilakukan pembentukan FKDM tingkat kecamatan, agar segera melaksakan tugasnya masing-masing dengan memasukkan anggaran pada AP P tahun 2020
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	kegiatan Upacara hari kesaktian pancasila dan hari bela negara tahun 2020	kegiatan tersebut belum teranggarkan pada APBD 2020 dan kegiatan tersebut merupakan hari besar nasional yang wajib dilaksanakan	memasukkan anggaran kegiatan terset pada APBD-P 2020 Badan Kesbangpol
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	kegiatan penyuluhan terkendala lokasi dan peserta terbatas dampak dari pandemi	tidak tercapainya target kinerja kegiatan dengan sasaran sekolah	melakukan penyesuaian target kinerja perubahan lokasi kegiatan
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pelaksanaan Pilkades serentak dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020	masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang lalu yang terdapat pada daerah perusahaan dan desa	perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke desa dan perusahaan secara dini untuk bisa berpartisipasi dalam gelaran pemilu ya akan datang

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Renstra PD pada tahun 2020

Pada rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2020 yang telah ditetapkan, dimana Badan Kesbangpol termasuk OPD yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran dan melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi keperluan pencapaian target kinerja. Sebagaimana pada Renja 2020, dalam rancangan awal ini perangkat daerah harus menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan RENSTRA dan diturunkan dalam perencanaan tahunan dalam RENJA OPD yang disajikan pada tabel berikut :

Prioritas 1 Reformasi Birokrasi

SASARAN	INDIKATOR	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Predikat	Seluruh	Pelayanan	Cakupan	100%
	Akuntabilitas	Urusan	administrasi	layanan	
	Kinerja Badan	Penunjang	perkantoran	administrasi	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.			perkantoran	
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	85%
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	87,39%
			Peningkatan Pengembangan	Tingkat Konsistensi	100%



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

			Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Renstra dan Renja	
				Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	100%
1. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila 3. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	1. Jumlah Konflik dan Gejolak 2. Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila 3. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Urusan wajib ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penanganan konflik	100%
				Cakupan penanganan gejolak masyarakat	100%
			Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Terhadap Bahaya Penyakit Masyarakat	80%
				Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik	80%
			Pendidikan politik masyarakat	Persentase ormas yang tertib administrasi	90%
				Persentase	100%



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

				parpol yang tertib administrasi	
			Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	80%
				Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	80%

Rancangan awal Perubahan RKPD telah memuat program beserta pagu indikatif OPD dan setelah dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan pada Renja Perubahan Badan Kesbangpol tahun 2020 yang dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kegiatan prioritas terutama untuk mendukung kelancaran dan situasi kondusif serta peningkatan partisipasi pemilih pada gelaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 pada bulan Desember 2020 yang akan datang, sehingga diperoleh hasil yang berbeda dengan yang terdapat pada rancangan awal perubahan RKPD tahun 2020, namun hal tersebut tidak merubah pagu secara keseluruhan dan hanya dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan rekening belanja untuk memenuhi keperluan dalam rangka peningkatan capaian kinerja.



Dari penjabaran rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan OPD tersebut dijabarkan lagi menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2020 berdasarkan pagu indikatif dimana terdapat perbedaan terkait perubahan kegiatan dan besaran pagu indikatif, maka hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat kelebihan anggaran yang tidak terpakai karena terdapat pembayaran dibawah perkiraan
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdapat kelebihan anggaran yang tidak terpakai karena tidak mengikuti pameran sanga sanga
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
- e. Penyediaan Bahan Logistik kantor, Penambahan untuk pembelian hand sanitizer
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman, Penambahan untuk keperluan sampai akhir tahun terkait penyediaan makan minum kantor
- g. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah, Bergeser antar rekening untuk Rapat-Rapat Koordinasi persiapan tahapan pemilukada Kukar
- h. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
- i. Penataan Arsip Perangkat Daerah, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, untuk perbaikan kendaraan roda 4 yang rusak berat
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung, penambahan untuk perbaikan genset kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- a. Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a. Kegiatan Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan, pengurangan karena tidak dilaksanakannya rakor fpk dan rakor provinsi serta pengurangan peserta
- b. Pembinaan Ideologi Karakter dan Wasbang (Peningkatan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan), pengurangan peserta karena protokol kesehatan
- c. Pembinaan Ideologi Karakter dan Wasbang (Kegiatan Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, pengurangan peserta karena protokol kesehatan
- d. Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan



7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

- a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Budaya, Pergeseran antar rekening kegiatan dan pengurangan peserta

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum, penambahan untuk keperluan rakor pilkada tiap dapil dan rakor se kabupaten serta perusahaan terkait pelaksanaan pemilu 2020 dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, karena pada Pilkada 2015 yang lalu hanya pada angka 58,93%

Secara keseluruhan proses perubahan renja 2020 Badan Kesbangpol Tidak dilaksanakan rasionalisasi karena masih terdapat kekurangan anggaran terutama untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi pemilu Bupati 2020 dan untuk memenuhi kebutuhan terkait sarana prasarana kerja yang sangat diperlukan, sehingga hanya dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan yang dianggap terdapat kelebihan sesuai hasil evaluasi s/d tw II dan dimanfaatkan untuk memenuhi kekurangan anggaran

Selengkapnya review terhadap rancangan awal perubahan RKPD tahun 2020 dapat disampaikan pada tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.287.602.903,40	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.190.432.653,40	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Jasa Surat Menyurat	400 lembar	1.950.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Jasa Surat Menyurat	400 lembar	1.950.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146 rekening	130.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144 rekening	112.200.000,00	terdapat kelebihan anggaran yang tidak terpakai karena terdapat pembayaran dibawah perkiraan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	OPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	42 unit	13.050.000,18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	OPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	42 unit	13.050.000,18	
4	Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	180 orang/bulan	-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	180 orang/bulan	-	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	OPD	Jumlah Peralatan yang diperbaiki	18 unit	5.000.000,04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	OPD	Jumlah Peralatan yang diperbaiki	18 unit	5.000.000,04	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	OPD	Jumlah Alat Tulis Kantor	27 item	25.614.651,06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	OPD	Jumlah Alat Tulis Kantor	27 item	25.443.001,06	Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD	Jumlah Barang Cetakan	5 cetakan	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD	Jumlah Barang Cetakan	5 cetakan	14.840.200,00	Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	113 buah	5.000.000,27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	113 buah	5.000.000,27	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	OPD	Jumlah Bahan Bacaan	12384 eksemplar	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	OPD	Jumlah Bahan Bacaan	12384 eksemplar	-	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Bahan Logistik Kantor	21 jenis barang	5.000.000,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Bahan Logistik Kantor	22 jenis barang	10.000.000,04	Penambahan untuk pembelian hand sanitizer
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	OPD	Jumlah Makanan dan Minuman	127 paket	10.000.000,32	Penyediaan Makanan dan Minuman	OPD	Jumlah Makanan dan Minuman	237 paket	18.000.000,32	Penambahan untuk keperluan sampai akhir tahun terkait penyediaan makan minum kantor

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENCANA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	OPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat	230 o/h	427.140.149,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	OPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat	210 o/h	401.140.149,00	Bergeser antar rekening untuk Rapat-Rapat Koordinasi persiapan tahapan pemilukada Kukar	
13	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	OPD	Jumlah Tenaga Harian Lepas	240 orang/bulan	374.848.102,49	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	OPD	Jumlah Tenaga Harian Lepas	240 orang/bulan	324.848.102,49	Efisiensi Anggaran sisa kegiatan	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 item	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 item	9.700.000,00	terdapat kelebihan anggaran yang tidak terpakai karena tidak mengikuti pameran sanga sanga	
15	Penataan Arsip Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Arsip	2.200 dokumen	250.000.000,00	Penataan Arsip Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Arsip	2.200 dokumen	249.261.200,00	Efisiensi Anggaran sisa kegiatan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	85%	130.000.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			85%	198.000.000,00		
16	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	OPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor	8 unit	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	OPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor	8 unit	-		
17	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	OPD	Jumlah peralatan gedung kantor	2 unit	35.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	OPD	Jumlah peralatan gedung kantor	2 unit	35.000.000,00		
18	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	OPD	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 unit gedung	20.000.000,00	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	OPD	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 unit gedung	20.000.000,00		
19	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	OPD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	34 unit	65.000.000,00	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	OPD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	34 unit	128.000.000,00	untuk perbaikan kendaraan roda 4 yang rusak berat	
20	Peneliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	OPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	25 unit	10.000.000,00	Peneliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	OPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	26 unit	15.000.000,00	Perbaikan genset kantor	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Surat Teguran	3 surat teguran	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Surat Teguran	3 surat teguran	-		
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	OPD	Jumlah Pakaian Dinas	110 orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	OPD	Jumlah Pakaian Dinas	110 orang	-		
22	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	OPD	Jumlah Pakaian Khusus	110 orang	-	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	OPD	Jumlah Pakaian Khusus	110 orang	-		

NO	RANCANGAN AWAL RKP/DIRENSTR PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DAMA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	87,39	100.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	87,39	98.100.000,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	15 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	15 orang	-		
24	Fasilitasi Tim Bekas Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Inovasi	1 Inovasi	100.000.000,00	Fasilitasi Tim Bekas Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Inovasi	1 Inovasi	98.100.000,00	Efisiensi Anggaran sisa kegiatan	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	367.480.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	365.320.500,00		
			1.Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	100%	217.480.000,00			1.Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset	100%	217.480.000,00		
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	OPD	Jumlah laporan keuangan	5 dokumen	45.000.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	OPD	Jumlah laporan keuangan	5 dokumen	45.000.000,00		
26	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	3 dokumen	129.600.000,00	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	3 dokumen	129.600.000,00		
27	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 dokumen	42.880.000,00	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 dokumen	42.880.000,00		
			2.Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	100%	150.000.000,00			2.Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja	100%	147.840.500,00		
28	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	OPD	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPI, LKJP dan Monev	6 dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	OPD	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPI, LKJP dan Monev	6 dokumen	147.840.500,00	Efisiensi Anggaran sisa kegiatan	
			3.Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100%	-			3.Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100%	-		
29	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat	OPD	Jumlah Laporan	5 laporan	-	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat	OPD	Jumlah Laporan	5 laporan	-		
	Program Peningkatan Keamanan dan Kevyamanan Lingkungan			100%	325.000.000,00	Program Peningkatan Keamanan dan Kevyamanan Lingkungan			100%	299.838.100,00		
			Cakupan penanganan konflik	100%	250.000.000,00			Cakupan penanganan konflik	100%	224.838.100,00		
30	Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penanganan Konflik	250 laporan	250.000.000,00	Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penanganan Konflik	220 laporan	224.838.100,00	Efisiensi Anggaran sisa kegiatan	
31	Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme	Kecamatan Anggana	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	100 orang	-	Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme	Kecamatan Anggana	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	100 orang	-		
			Cakupan penanganan gejala masyarakat	100%	75.000.000,00			Cakupan penanganan gejala masyarakat	100%	75.000.000,00		
32	Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar	18 kecamatan	Jumlah laporan Pemantauan	18 Laporan	75.000.000,00	Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar	18 kecamatan	Jumlah laporan Pemantauan	18 Laporan	75.000.000,00		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			80%	2.459.993.040,00	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			80%	1.946.421.040,00		

NO	RANCANGAN AWAL RKP/DREINSTR PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang	80%	2.459.993.040,00			1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang	80%	1.946.421.040,00		
33	Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan	18 kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	2252 orang	1.159.993.040,00	Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan	18 kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	1582 orang	937.633.040,00		pengurangan karena tidak dilaksanakannya rakor fpk dan rakor provinsi serta pengurangan peserta
34	Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang (Bela Negara dan Wasbang	1 kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	100 orang	1.075.000.000,00	Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang (Bela Negara dan Wasbang	1 kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	80 orang	805.000.000,00		pengurangan peserta karena protokol kesehatan
35	Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang (Pembinaan Ideologi)	3 kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	300 orang	200.000.000,00	Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang (Pembinaan Ideologi)	3 kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	210 orang	180.788.000,00		pengurangan peserta karena protokol kesehatan
36	Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah	9 kecamatan	Jumlah lokasi Pengawasan	9 kecamatan	-	Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah	9 kecamatan	Jumlah lokasi Pengawasan	9 kecamatan	-		
37	Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional	Kabupaten	Jumlah upacara	3 upacara	25.000.000,00	Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional	Kabupaten	Jumlah upacara	3 upacara	23.000.000,00		Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
			2. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	80%	-			2. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	80%	-		
38	Fasilitasi Ketahanan Budaya	1 kecamatan	Jumlah peserta	100 orang	-	Fasilitasi Ketahanan Budaya	1 kecamatan	Jumlah peserta	100 orang	-		
39	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi di Daerah	1 kecamatan	Jumlah yang difasilitasi	100 orang	-	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi di Daerah	1 kecamatan	Jumlah yang difasilitasi	100 orang	-		
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat	80%	200.000.000,00	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat	80%	200.000.000,00		
40	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya	18 kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	1600 orang	200.000.000,00	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya	18 kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	270 orang	200.000.000,00		
41	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Ekonomi	1 kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	100 orang	-	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Ekonomi	1 kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	100 orang	-		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	18 kecamatan	Jumlah Dokumen	18 dokumen	-	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	18 kecamatan	Jumlah Dokumen	18 dokumen	-	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat		1. Persentase pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap politik	80%	1.854.000.000,00	Program Pendidikan Politik Masyarakat		1. Persentase pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap politik	80%	2.625.963.650,00	
43	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	3 kecamatan	Jumlah peserta	300 orang	-	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	3 kecamatan	Jumlah peserta	300 orang	-	
44	Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	18 kecamatan	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	50 laporan	-	Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	18 kecamatan	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	50 laporan	-	
45	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum	18 kecamatan	Jumlah peserta dan laporan	5.000 orang	1.724.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum	18 kecamatan	Jumlah peserta dan laporan	5.150 orang	2.495.963.650,00	penambahan untuk keperluan rakor pilkada tiap dapil dan rakor se kabupaten serta perusahaan terkait pelaksanaan pemilu 2020
			2. Persentase ormas yang tertib administrasi	90%	80.000.000,00			2. Persentase ormas yang tertib administrasi	90%	80.000.000,00	
46	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan	18 kecamatan	Jumlah Ormas yang difasilitasi	20 ormas	30.000.000,00	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan	18 kecamatan	Jumlah Ormas yang difasilitasi	20 ormas	30.000.000,00	
47	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peserta	50 orang	50.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peserta a	50 orang	50.000.000,00	
			3. Persentase parpol yang tertib administrasi	100%	50.000.000,00			3. Persentase parpol yang tertib administrasi	100%	50.000.000,00	
48	Fasilitasi Partai Politik	Kabupaten	Jumlah parpol yang di fasilitasi	16 Parpol	50.000.000,00	Fasilitasi Partai Politik	Kabupaten	Jumlah parpol yang di fasilitasi	16 Parpol	50.000.000,00	
49	Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas	Kabupaten	Jumlah peserta	50 orang	-	Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas	Kabupaten	Jumlah peserta	50 orang	-	
	JUMLAH				6.724.075.943,40	JUMLAH				6.924.075.943,40	



Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

NIP. 19691226 200112 2 002



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya perubahan rencana kerja tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi pada semester pertama. Perubahan target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya.

Dalam rangka mengimplementasikan renstra Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik badan sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

Anggaran 2020 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Perubahan Renstra Badan Kesbangpol 2016 – 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Jumlah Konflik dan Gejolak	Kesbangpol, Kepolisian dan TNI
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	2. Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	Kesbangpol dan Kepolisian
3	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	3. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Kesbangpol dan KPU

Dalam tahun anggaran 2020 dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra, sebagai berikut :

1. Diperlukan upaya lebih dalam pencegahan dan penanganan munculnya paham radikalisme
2. Masih banyaknya masalah sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun perkebunan



3. Pencegahan dan penanganan konflik dalam rangka menjelang Pemilihan Umum khususnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020
4. Terdapat kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak timbulnya gejolak di masyarakat
5. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA
6. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
7. Masih tingginya angka penyakit masyarakat terutama peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
8. Denga terbitnya peraturan baru terkait ormas dan partai politik, maka perlunya untuk memfasilitasi ormas dan parpol dalam permasalahan terkait hal tersebut
9. Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih lagi.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahan Rencana kerja tahun 2020 dan target kegiatan tahun 2020 tidak mengalami perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya hanya terdapat perubahan terkait pergeseran anggaran.



. Adapun jumlah kegiatan pada perubahan Renja tahun 2020 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 4 program dan 22 kegiatan
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 4 program dan 11 kegiatan
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 8 program dan 33 kegiatan

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD, untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum
 - b. Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan
 - c. Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah
 - d. Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang
 - e. Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional

Adapun perincian kegiatan pada Perubahan Renja tahun 2020 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

,

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BURUK ANG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
		Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.287.602.903,40	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.190.432.653,40	(97.170.250,00)	100%	1.365.578.000,89
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	OPD	400 lembar	1.950.000,00	Jumlah Jasa Surat Menyurat	OPD	400 lembar	1.950.000,00	-	500 lembar	2.400.000,00
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	146 rekening	130.000.000,00	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	144 rekening	112.200.000,00	(17.800.000,00)	146 rekening	130.000.000,00
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	OPD	42 unit	13.050.000,18	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	OPD	42 unit	13.050.000,18	-	42 unit	13.050.000,18
4		Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa administrasi keuangan	OPD	180 orang/bulan	-	Jumlah jasa administrasi keuangan	OPD	180 orang/bulan	-	-	-	-
5		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan yang diperbaiki	OPD	18 unit	5.000.000,04	Jumlah Peralatan yang diperbaiki	OPD	18 unit	5.000.000,04	-	18 unit	8.000.000,00
6		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	OPD	27 item	25.614.651,06	Jumlah Alat Tulis Kantor	OPD	27 item	25.443.001,06	(171.650,00)	27 item	35.741.472,08
7		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	OPD	5 cetakan	15.000.000,00	Jumlah Barang Cetakan	OPD	5 cetakan	14.840.200,00	(159.800,00)	5 eksemplar	30.000.000,00
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	OPD	113 buah	5.000.000,27	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	OPD	113 buah	5.000.000,27	-	113 buah	5.000.000,27
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	OPD	12384 eksemplar	-	Jumlah Bahan Bacaan	OPD	12384 eksemplar	-	-	-	-
10		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	OPD	21 jenis barang	5.000.000,04	Jumlah Bahan Logistik Kantor	OPD	22 jenis barang	10.000.000,04	5.000.000,00	21 jenis	8.000.000,04
11		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	OPD	127 paket	10.000.000,32	Jumlah Makanan dan Minuman	OPD	237 paket	18.000.000,32	8.000.000,00	127 paket	10.000.000,32
12		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat- rapat	OPD	230 o/h	427.140.149,00	Jumlah kegiatan rapat- rapat	OPD	210 o/h	401.140.149,00	(26.000.000,00)	300 orang/hari	510.000.000,00
13		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Harian Lepas	OPD	240 orang/bulan	374.848.102,49	Jumlah Tenaga Harian Lepas	OPD	240 orang/bulan	324.848.102,49	(50.000.000,00)	240 orang/bulan	378.386.528,00
14		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	25 item	25.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	20 item	9.700.000,00	(15.300.000,00)	25 item	35.000.000,00
15		Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip	OPD	2.200 dokumen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Arsip	OPD	2.200 dokumen	249.261.200,00	(738.800,00)	2.200 dokumen	200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/IBDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKUR ANG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip		37 unit		Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip		37 unit				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik		85%	130.000.000,00	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik		85%	198.000.000,00	68.000.000,00	88%	362.000.000,00
16		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	OPD	8 unit	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor	OPD	8 unit	-	-	4 unit	35.000.000,00
17		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	OPD	2 unit	35.000.000,00	Jumlah peralatan gedung kantor	OPD	2 unit	35.000.000,00	-	18 unit	127.000.000,00
18		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	OPD	2 unit gedung	20.000.000,00	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	OPD	2 unit gedung	20.000.000,00	-	2 unit gedung	100.000.000,00
19		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	OPD	34 unit	65.000.000,00	Jumlah kendaraan yang dipelihara	OPD	34 unit	128.000.000,00	63.000.000,00	34 unit	80.000.000,00
20		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	OPD	25 unit	10.000.000,00	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	OPD	26 unit	15.000.000,00	5.000.000,00	25 unit	20.000.000,00
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Surat Teguran		3 surat teguran	-	Jumlah Surat Teguran		3 surat teguran	-	-	-	-
21		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	OPD	110 orang	-	Jumlah Pakaian Dinas	OPD	110 orang	-	-	0	0
22		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus	OPD	110 orang	-	Jumlah Pakaian Khusus	OPD	110 orang	-	-	0	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP		87,39	100.000.000,00	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP		87,39	98.100.000,00	(1.900.000,00)	87,39	100.000.000,00
23		Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Dalam dan Luar Daerah	15 orang	-	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Dalam dan Luar Daerah	15 orang	-	-	-	-
24		Fasilitasi Tim Bekas Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	OPD	1 inovasi	100.000.000,00	Jumlah Inovasi	OPD	1 inovasi	98.100.000,00	(1.900.000,00)	1 inovasi	100.000.000,00
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	367.480.000,00			100%	365.320.500,00	(2.159.500,00)	100%	367.480.000,00
			1. Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset		100%	217.480.000,00	1. Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset		100%	217.480.000,00	-	100%	217.480.000,00
25		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Jumlah laporan keuangan	OPD	5 dokumen	45.000.000,00	Jumlah laporan keuangan	OPD	5 dokumen	45.000.000,00	-	5 dokumen	45.000.000,00
26		Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	OPD	3 dokumen	129.600.000,00	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	OPD	3 dokumen	129.600.000,00	-	3 dokumen	129.600.000,00
27		Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	OPD	2 dokumen	42.880.000,00	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	OPD	2 dokumen	42.880.000,00	-	2 dokumen	42.880.000,00
			2. Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja		100%	150.000.000,00	2. Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja		100%	147.840.500,00	(2.159.500,00)	100%	150.000.000

NO	KODE	URUSAN/IBIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2					7				11	12	13	14
28		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPI, LKJP dan Monev	5	6 dokumen	150.000.000,00	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPI, LKJP dan Monev	OPD	6 dokumen	147.840.500,00	(2.159.500,00)	6 dokumen	150.000.000
			3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit		100%	-	3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit		100%	-	-	-	-
29		Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat	Jumlah Laporan	OPD	5 laporan	-	Jumlah Laporan	OPD	5 laporan	-	-	-	0
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			100%	375.000.000,00			100%	299.838.100,00	(25.161.900,00)	100%	575.000.000,00
			Cakupan penanganan konflik		100%	250.000.000,00	Cakupan penanganan konflik		100%	224.838.100,00	(25.161.900,00)	100%	500.000.000,00
30		Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah	Jumlah Laporan	Kabupaten Kutai Kartanegara	250 laporan	250.000.000,00	Jumlah Laporan Penanganan Konflik	Kabupaten Kutai Kartanegara	220 laporan	224.838.100,00	(25.161.900,00)	350 laporan	500.000.000,00
31		Sosialisasi Budaya Radikalisme dan Terorisme	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	Kecamatan Anggana	100 orang	-	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	Kecamatan Anggana	100 orang	-	-	-	-
			Cakupan penanganan gejala masyarakat		100%	75.000.000,00	Cakupan penanganan gejala masyarakat		100%	75.000.000,00	-	100%	75.000.000,00
32		Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar	Jumlah laporan Pemantauan	18 kecamatan	18 Laporan	75.000.000,00	Jumlah laporan Pemantauan	18 kecamatan	18 Laporan	75.000.000,00	-	18 Laporan	75.000.000,00
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			80%	2.459.993.040,00			80%	1.946.421.040,00	(513.572.000,00)	100%	1.880.567.600,00
			1. Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang		80%	2.459.993.040,00	1. Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang		80%	1.946.421.040,00	(513.572.000,00)	100%	1.880.567.600,00
33		Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	18 kecamatan	2252 orang	1.159.993.040,00	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	18 kecamatan	1582 orang	937.633.040,00	(222.360.000,00)	1.400 orang	918.567.600,00
34		Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang (Bela Negara dan Wasbang	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	1 kecamatan	100 orang	1.075.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	1 kecamatan	80 orang	805.000.000,00	(270.000.000,00)	200 orang	887.000.000,00
35		Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang (Pembinaan Ideologi)	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	3 kecamatan	300 orang	200.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan	3 kecamatan	210 orang	180.788.000,00	(19.212.000,00)	-	0
36		Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah	Jumlah lokasi Pengawasan	9 kecamatan	9 kecamatan	-	Jumlah lokasi Pengawasan	9 kecamatan	9 kecamatan	-	-	-	-
37		Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional	Jumlah upacara	Kabupaten	3 upacara	25.000.000,00	Jumlah upacara	Kabupaten	3 upacara	23.000.000,00	(2.000.000,00)	3 kegiatan	75.000.000,00
			2. Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud		80%	-	2. Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud		80%	-	-	-	-
38		Fasilitasi Ketahanan Budaya	Jumlah peserta	1 kecamatan	100 orang	-	Jumlah peserta	1 kecamatan	100 orang	-	-	-	0
39		Fasilitasi Ketahanan Ekonomi di Daerah	Jumlah yang difasilitasi	1 kecamatan	100 orang	-	Jumlah yang difasilitasi	1 kecamatan	100 orang	-	-	-	0

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/BERKURANG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat		80%	200.000.000,00	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat		80%	200.000.000,00	-	100%	230.000.000,00
40		Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	18 kecamatan	1600 orang	200.000.000,00	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	18 kecamatan	270 orang	200.000.000,00	-	660 orang	150.000.000,00
41		Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	1 kecamatan	100 orang	-	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	1 kecamatan	100 orang	-	-	100 orang	80.000.000,00
42		Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Dokumen	18 kecamatan	18 dokumen	-	Jumlah Dokumen	18 kecamatan	18 dokumen	-	-	-	-
		Program Pendidikan Politik Masyarakat				1.854.000.000,00							
			1. Persentase pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap politik		80%	1.724.000.000,00	1. Persentase pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap politik		80%	2.495.963.650,00	771.963.650,00	100%	1.300.000.000,00
43		Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Jumlah peserta	3 kecamatan	300 orang	-	Jumlah peserta	3 kecamatan	300 orang	-	-	1.000 orang	800.000.000,00
44		Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	18 kecamatan	50 laporan	-	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	18 kecamatan	50 laporan	-	-	150 laporan	500.000.000,00
45		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum	Jumlah peserta dan laporan	18 kecamatan	5.000 orang	1.724.000.000,00	Jumlah peserta dan laporan	18 kecamatan	5.150 orang	2.495.963.650,00	771.963.650,00	-	-
			2. Persentase ormas yang tertib administrasi		90%	80.000.000,00	2. Persentase ormas yang tertib administrasi		90%	80.000.000,00	-	100%	150.000.000,00
46		Fasilitasi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang difasilitasi	18 kecamatan	20 ormas	30.000.000,00	Jumlah Ormas yang difasilitasi	18 kecamatan	20 ormas	30.000.000,00	-	30 ormas	50.000.000,00
47		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah	Jumlah peserta	Kabupaten Kutai Kartanegara	50 orang	50.000.000,00	Jumlah peserta	Kabupaten Kutai Kartanegara	50 orang	50.000.000,00	-	160 orang	100.000.000,00
			3. Persentase parpol yang tertib administrasi		100%	50.000.000,00	3. Persentase parpol yang tertib administrasi		100%	50.000.000,00	-	100%	150.000.000,00
48		Fasilitasi Partai Politik	Jumlah parpol yang difasilitasi	Kabupaten	16 Parpol	50.000.000,00	Jumlah parpol yang difasilitasi	Kabupaten	16 Parpol	50.000.000,00	-	16 Parpol	75.000.000,00
49		Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas	Jumlah peserta	Kabupaten	50 orang	-	Jumlah peserta	Kabupaten	50 orang	-	-	50 orang	75.000.000,00
		JUMLAH				6.724.075.943,40				6.924.075.943,40	200.000.000,00		6.480.625.601



 Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Kutai Kartanegara,
 RINDA DESIANI, S.Sos., M.Si
 NIP. 19691226-200112 2 002



BAB IV

P E N U T U P

A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Ada beberapa sasaran yang belum mengakomodir kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh untuk tahun 2020. Hal ini bukan berarti sasaran tersebut tidak menjadi perhatian namun lebih fokus pada prioritas kegiatan sebagaimana tertera di atas untuk tahun 2020, dalam rangka mensinergikan kegiatan sesuai dengan misi RPJMD 2016 – 2021 khususnya untuk tahun kelima pelaksanaan RPJMD. Sehingga sasaran yang belum direalisasikan pada semester pertama dalam kegiatan 2020 secara bertahap akan dilaksanakan pada semester kedua, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang tersedia.

Terdapat beberapa catatan penting terkait proses reviu Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan OPD yang menimbulkan perbedaan dalam proses tersebut yang akan ditindaklanjuti pada pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat kelebihan anggaran yang tidak terpakai karena terdapat pembayaran dibawah perkiraan
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdapat kelebihan anggaran yang tidak terpakai karena tidak mengikuti pameran sanga sanga
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan



- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
 - e. Penyediaan Bahan Logistik kantor, Penambahan untuk pembelian hand sanitizer
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman, Penambahan untuk keperluan sampai akhir tahun terkait penyediaan makan minum kantor
 - g. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah, Bergeser antar rekening untuk Rapat-Rapat Koordinasi persiapan tahapan pemilukada Kukar
 - h. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
 - i. Penataan Arsip Perangkat Daerah, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, untuk perbaikan kendaraan roda 4 yang rusak berat
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung, penambahan untuk perbaikan genset kantor
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- a. Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan
- 5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
- a. Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan



6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a. Kegiatan Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan, pengurangan karena tidak dilaksanakannya rakor fpk dan rakor provinsi serta pengurangan peserta
- b. Pembinaan Ideologi Karakter dan Wasbang (Peningkatan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan), pengurangan peserta karena protokol kesehatan
- c. Pembinaan Ideologi Karakter dan Wasbang (Kegiatan Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, pengurangan peserta karena protokol kesehatan
- d. Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional, Efisiensi Anggaran sisa kegiatan

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

- a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Budaya, Pergeseran antar rekening kegiatan dan pengurangan peserta

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum, penambahan untuk keperluan rakor pilkada tiap dapil dan rakor se kabupaten serta perusahaan terkait pelaksanaan pemilu 2020 dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, karena pada Pilkada 2015 yang lalu hanya pada angka 58,93%

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2020 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2020 yang



harus diperhatikan oleh para penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan, antara lain :

1. Seluruh penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, utamanya program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2020 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi dan sinergitas.
2. Setiap penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan Renja Badan Kesbangpol tahun 2020 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja perangkat daerah.
3. Kepala Badan, melalui Sekretaris, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap bidang secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020
4. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2020, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi



dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Rencana Tindak Lanjut

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD, untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Melakukan pergeseran antar kegiatan dan kode rekening belanja
4. Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
 - a. Prioritas 1
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum
 - Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan
 - Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah
 - Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang
 - Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional

Usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Perubahan Renja bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.



RANCANGAN PERUBAHAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Perubahan Renja OPD meliputi : 1) Merumuskan kegiatan, 2) Merumuskan indikator kegiatan, 3) menetapkan target setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja semester pertama.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tenggarong, 24 Juli 2020

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002